

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI LINGKUNGAN ATAS BIAYA
PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
VII (PERSERO) PPKS UNIT USAHA BETUNG**



Nama : Estri Mei Sari

Nim : 14190105

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E)**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Estri Mei Sari
Nim/Jurusan : 14190105/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Atas Biaya Pengelolaan Limbah Pabrik PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

Telah diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal November 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Rika Lidyah, SE., M.Si., AK., CA
	t.t	:
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Emi Yulia Siska, SE., M.Si
	t.t	:
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Rusydi, M.Ag
	t.t	:
Tanggal	Penguji Kedua	: Hilda, SE., M.Si
	t.t	:
Tanggal	Ketua	: Titin Hartini, SE. M.Si.,
	t.t	:
Tanggal	Sekretaris	: Mismiwati, SE., MP
	t.t	:

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Estri Mei Sari
NIM : 14190105
Jenjang : S1 Ekonomi Syariah

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, November 2018

Saya yang menyatakan



Estri Mei Sari

NIM.14190105



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Atas Biaya Pengelolaan
Limbah Pabrik PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit
Usaha Betung
Ditulis oleh : Estri Mei Sari
NIM : 14190105

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)

Palembang, November 2018
Dekan,

Dr. Qodariah Barkah, M.H.I
NIP. 197011261997032002



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Estri Mei Sari
Nim/Jurusan : 14190105 / Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Atas Biaya Pengelolaan Limbah Pabrik PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Desember 2018

Penguji Utama

Dr. Rusydi, M.Ag
NIP. 1973080120051007

Penguji Kedua

Hilda, SE., M.Si
NIP. 197402142003122002



Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Maftukhatul Solikhah, M.Ag
NIP. 197509282006042001

Motto dan Kata Persembahan

Motto:

☞ Apa yang Allah SWT pilihkan bagi hamba-Nya yang beriman adalah pilihan terbaik, meski tampak sulit, berat, atau memerlukan pengorbanan harta, kedudukan, jabatan, keluarga, anak, atau bahkan lenyapnya dunia dan seisinya
(Abdullah Azzam)

☞ Keyakinan adalah kunci dirimu, saat kau yakin bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik untukmu dari-Nya maka ridho-Nya dan suksesmu akan mengikuti
(Estri Mei Sari)

☞ Tidak akan ada keberhasilan tanpa ikhtiar dan tidak akan ada ketenangan tanpa tawakal, karena kunci suksesmu ada pada keduanya

(Estri Mei Sari)

Kupersembahkan untuk:

☞ ALLAH SWT Dzat yang senantiasa menyertaiku

☞ Bapak & Mama tercinta atas kepercayaan dan harapan besarnya

☞ Adik dan ayukku tersayang atas motivasi dan dukungan morilnya

☞ Almamaterku, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

☞ Sahabat-sahabatku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB—LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atas
ج	Ji>m	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawah
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>	D	-
ذ	Z a>	Z	z dengan titik di atas
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawah
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawah
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawah
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawah
ع	`Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa>'	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>'	H	-
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya>'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (tasydid) ditulis rangkap

Contoh:

مقدم : muqaddimah

ةنيدملا ةروئملا : al- madī nah al- munawwarah

C. Ta>` Marbûthah *di akhir kata*

1. Bila dimatikan (ta` marbûthah sukun) ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

بِعِبَادَةِ : ditulis *bi 'ibâdah*.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (ta` marbûthah sambung) ditulis t

بِعِبَادَةِ رَبِّي : ditulis *bi 'ibâdati rabbih*.

D. Huruf Vokal

1. Vokal Tunggal

- a. Fathah (---) = a
- b. Kasrah (---) = i
- c. Dhammah(---) = u

2. Vokal Rangkap

- a. (اي) = ay
- b. (ي --) = îy
- c. (او) = aw
- d. (و --) = ûw

3. Vokal Panjang

- a. (ا---) = a>
- b. (ي---) = i>
- c. (و---) = u>

E. Kata Sandang

Penulisan *al qamariyyah* dan *al syamsiyyah* menggunakan *al*:-

1. *Al qamarîyah* contohnya: ”الحمد“ ditulis *al-ḥamd*
2. *Al syamsîyah* contohnya: “النمل” ditulis *al-naml*

F. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

G. Kata dalam Rangkainan Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

H. Daftar Singkatan

H	=	Hijriyah
M	=	Masehi
hal.	=	halaman
Swt.	=	<i>subhânahu wa ta'âlâ</i>
saw.	=	<i>sall Allâh 'alaih wa sallam</i>
QS	=	al-Qur`ân Surat
HR	=	Hadis Riwayat
terj.	=	terjemah

I. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Akuntansi lingkungan adalah bidang ilmu akuntansi yang berfungsi mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan akuntansi lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negative dari operasional perusahaan yang memerlukan system akuntansi lingkungan sebagai control terhadap tanggung jawab perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi atas biaya lingkungan yang mencakup bagaimana perusahaan mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan biaya lingkungan dalam laporan keuangan. Penelitian dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung.

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung telah melakukan kontribusi dibidang lingkungan akan tetapi belum diwujudkan sepenuhnya hal ini terlihat dari biaya lingkungan belum dipisahkan sebagai pendukung untuk pengelolaan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil dengan cara wawancara mengenai tata cara perlakuan akuntansi yang ada di perusahaan dan data sekunder yang diambil dari dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif mendeskripsikan temuan kemudian akan dianalisis perlakuan akuntansi atas biaya pengelolaan limbah, selanjutnya dibandingkan dengan PSAK..

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perusahaan sudah cukup baik dalam perlakuan akuntansi biaya lingkungan hanya saja biaya lingkungan tersebut masih disajikan bergabung dengan biaya administrasi dan umum selain itu, pengungkapannya dalam catatan atas laporan keuangan belum disajikan secara rinci dan belum mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan tentang biaya tersebut.

Kata kunci : *Perlakuan Akuntansi Lingkungan, Biaya Lingkungan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunianya kepada kita semua telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan serta karunia-Nya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Laporan penelitian ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman yang telah membawa kita kebenaran.

Tidak lepas dari pertolongan dan hidayah-Nya peneliti dapat menyusun laporan ini untuk memenuhi tugas akhir Skripsi yang berjudul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Atas Biaya Pengelolaan Limbah Pabrik PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung**”.

Selama penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan semangat dan motivasi dari berbagai pihak demi kelancaran penyusunan Skripsi ini, yaitu kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tuaku, bapakku Edison dan mamakku Ristikawati yang paling kusayangi dan kucintai, serta Kakakku, Ayukku dan Keponakanku yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini
2. Prof.Drs.H. M. Sirozi, ph.DS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Dr. Qodariah Barkah, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Titin Hartini, SE. M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Rika Lidyah, SE.,M.Si.,AK.,CA., selaku dosen pembimbingan I yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.
6. Ibu Emi Yulia Siska, SE.,M.Si., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sampai akhirnya saya bisa menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada Seluruh Dosen Fakultas Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang atas ilmu yang telah diajarkan selama perkuliahan.
8. Sahabat seperjuanganku selama ini Fitria Handayaniyang selama ini selalu menemaniku baik dalam keadaan suka maupun duka.
9. Sahabat SMPku Olips dan Ulan yang selalu memberikan semangat kepadaku.
10. Seluruh teman-teman EKI 3/2014 yang terkasih.

Akhir kata hanya kepada Allah penulis memanjatkan do'a, semoga Allah SWT memberikan balasan berupa amal yang berlipat kepada mereka. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi orang lain. Amin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, November 2018

Penulis

Estri Mei Sari

Nim : 141901

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Definisi Akuntansi Lingkungan	20
B. Tujuan Akuntansi Lingkungan	21
C. Pentingnya Akuntansi Lingkungan	22
D. Fungsi dan Peran Akuntansi Lingkungan	23
E. Definisi Biaya Lingkungan	25
F. Tahap-tahap Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan	27
G. Dasar Hukum Akuntansi Lingkungan di Indonesia	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tempat Penelitian	37
B. Profil Objek Penelitian	37
C. Deskripsi Kegiatan Perusahaan	38
D. Visi dan Misi Perusahaan	38
E. Struktur Organisasi Perusahaan	39
F. Uraian Tugas	39
G. Limbah Operasional Perusahaan	50
H. Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Perusahaan	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identifikasi Biaya Lingkungan	59
B. Pengakuan	63
C. Pengukuran	65
D. Penyajian	66
E. Pengungkapan	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
C. Keterbatasan	71

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Biaya Umum PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung Tahun 2016	52
Tabel 3.2 Biaya Umum PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung Tahun 2017	53
Tabel 3.3 Rincian Biaya Limbah PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung	54
Tabel 4.1 Perbandingan Alokasi Biaya	61
Tabel 4.2 Perbandingan Pengakuan Biaya Lingkungan	64
Tabel 4.3 Perbandingan Pengukuran Biaya Lingkungan	65
Tabel 4.4 Rincian Lingkungan (Biaya Pengelolaan Limbah) PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan tidak lagi menjadi suatu isu yang baru. Permasalahan lingkungan semakin menarik untuk dikaji seiring dengan perkembangan era industri. Era industri tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup, namun di sisi lain peningkatan jumlah industri tersebut berbanding lurus terhadap peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi perusahaan.¹

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah diartikan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Akuntansi lingkungan ini merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan akuntansi lingkungan. Dalam hal ini, pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari operasional perusahaan yang memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai

¹Antonius Wasi Wanggono, *Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan*, Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016, hlm 01

kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengolahan limbah yang dilakukan oleh perusahaan memerlukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan mengungkapkan biaya pengolahan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan.²

Perlakuan terhadap masalah penanganan limbah hasil operasional perusahaan ini menjadi sangat penting dalam kaitannya sebagai sebuah *control* tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. Proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi perhitungan biaya pengolahan limbah tersebut merupakan masalah akuntansi yang menarik untuk dilakukan penelitian sebab selama ini belum dirumuskan secara pasti bagaimana metode pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi lingkungan di sebuah perusahaan.

Saat ini di Indonesia pengungkapan mengenai akuntansi lingkungan masih belum diatur secara khusus dalam standar akuntansi, artinya pelaporan informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela. Akan tetapi IAI menjelaskan bahwa laporan tahunan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan.³ Dijelaskan dalam PSAK No. 1 Tahun 2015, paragraf empat belas (14) yang menyatakan : Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususny bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup

²Ikhsan Arfan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm 16

³Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm 15

memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting.⁴

Pemerintah Indonesia, telah menetapkan peraturan berkenaan dengan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 hingga 4 menyatakan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dalam memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Industri yang dijadikan objek penelitian ini adalah PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung. Adapun alasan yang melatarbelakangi melakukan penelitian di Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung karena Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung merupakan unit usaha yang banyak menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan adalah limbah tankos, limbah cangkang, limbah ampas/ fible, Limbah cair, dan Limbah gas.

⁴⁴Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015 (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2014) hlm 45

Pengelolaan limbah pabrik dimaksudkan untuk mengurangi substansi pencemaran lingkungan. Adapun macam-macam limbah ini dimanfaatkan sebagai kebutuhan pabrik dan upaya yang diberikan untuk mengoptimalkan tanggung jawab sosial disamping pemberian bantuan finansial untuk modal usaha. Pemanfaatan limbah ini hendaknya didukung dengan pengelolaan lingkungan secara tepat agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

Setelah dilakukan observasi pendahuluan oleh peneliti, Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung telah melakukan kontribusi di bidang lingkungan akan tetapi belum diwujudkan sepenuhnya hal ini terlihat dari biaya lingkungan belum dipisahkan sebagai pendukung untuk pengelolaan lingkungan. Pengelolaan dan pengalokasian biaya lingkungan secara praktis tidak bermasalah pada penanggulangan dampak negatif namun secara akuntansi pengalokasian biaya tersebut dapat mengurangi akuntabilitas Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Betung. Laporan yang mengungkapkan biaya lingkungan di Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung masih menggunakan akuntansi konvensional dan laporan biaya lingkungan belum disendirikan. Metode pengalokasian biaya untuk pengelolaan lingkungan hendaknya dialokasikan sebagai biaya tambahan. Permasalahan tersebut selayaknyadiwujudkan dalam pelaporan keuangan yaitu akuntansi lingkungan.

Penelitian yang terkait mengenai akuntansi lingkungan ialah penelitian yang dilakukan oleh Elyafei (2012) pada RSUD Tarakan Jakarta, penelitian ini menggunakan analisa perlakuan akuntansi lingkungan berdasarkan teori Hansen

dan Mowen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit telah mengidentifikasi semua biaya, namun biaya kegagalan eksternal belum dilakukan oleh rumah sakit. Penelitian lain yang menggunakan model identifikasi yang sama adalah penelitian yang dilakukan oleh Meilanawati (2013) pada PT Semen Indonesia, penelitian ini membandingkan biaya-biaya lingkungan yang dilakukan perusahaan dengan model klasifikasi biaya lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tidak mencatat semua biaya lingkungan sesuai dengan teori yang digunakan sehingga menimbulkan penyimpangan untuk perbaikan, proyek perlindungan lingkungan, dan lain-lain.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengacu pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) dan konsep akuntansi lain yang terkait adalah penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) pada PT SUB Unit Jember. Hasil yang di dapat adalah bahwa perusahaan telah mengidentifikasi, mengakui, mengukur, dan menyajikan sesuai dengan konsep teori yang digunakan, namun pengungkapan yang dilakukan belum sesuai dengan konsep teori yang ada.

Penelitian yang menggunakan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) seperti yang dilakukan oleh Kusumawati (2015) pada RSUD DR R Koesma Tuban. Hasil penelitian didapati bahwa rumah sakit telah mengidentifikasi beberapa biaya lingkungan dan mengakui beban serta pendapatan dari kegiatan pengolahan limbah. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2014) pada PT. Swasti Siddhi Amagra, penelitian tersebut menggunakan identifikasi menurut teori Hansen dan Mowen serta PSAK. Hasil penelitian

tersebut bahwa perusahaan telah mengakui dan mengukur sesuai dengan kebijakan sendiri, perusahaan belum mengidentifikasi dan mengungkapkan biaya tersebut sesuai dengan acuan teori yang digunakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Atas Biaya Pengelolaan Limbah Pabrik PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan “Bagaimana perlakuan akuntansi lingkungan yang meliputi pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas biaya pengelolaan limbah pabrik PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan tugas skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi lingkungan yang meliputi pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas biaya pengelolaan limbah pabrik PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

b. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagi PTPN VII (Persero) Unit Betung.

Penulisan tugas skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan sehubungan dengan perlakuan akuntansi biaya pengelolaan limbah pabrik.

2. Bagi Universitas UIN Raden Fatah Palembang

Penulisan tugas skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi perpustakaan, selain itu sebagai bahan bacaan serta pengetahuan bagi pembaca dalam melakukan penyusunan tugas akhir selanjutnya.

3. Bagi Penulis

Penulisan tugas skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait perlakuan akuntansi biaya pengelolaan limbah pabrik.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan yaitu :

1. Amalia (2011) membahas perlakuan akuntansi biaya pengelolaan limbah dalam laporan keuangan studi kasus pada PT. Panca Mitra Multi Perdana Situbondo. Pada penelitian tersebut membahas mengenai biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pengelolaan limbah dari hasil pabrikasinya, yang kemudian menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi pengelolaan limbah menyangkut definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyajian dalam laporan keuangan. Terdapat dua limbah yang ditemukan dalam penelitian tersebut yaitu limbah padat dan limbah cair. Perusahaan belum membuat laporan

biaya lingkungan secara khusus, namun berapa akun (pos-pos) telah mengakui adanya pengelolaan limbah. Namun tidak dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan.

2. Wida Rahayu (2015), Analisis Perlakuan Akuntansi atas Biaya Pengolahan Limbah Pabrik Gula Lestari Nganjuk PT. Perkebunan Nusantara X adapun hasil penelitiannya Pabrik Gula Lestari melakukan tahapan perlakuan akuntansi untuk biaya pengolahan limbah didasarkan adanya pengklasifikasian biaya pengolahan limbah. Dalam mengakui biaya pabrik menggunakan metode actual basis. Dalam pengukuran biaya lingkungan (dalam hal pengolahan limbah) yang dilakukan pabrik gula lestari menggunakan satuan rupiah. Penyajian biaya pengolahan limbah pabrik sesuai dengan PSAK tahun 2013 dan Pabrik Gula Lestari sudah mengungkapkan kebijakan-kebijakan akuntansi terkait biaya pengolahan limbah dalam laporan posisi keuangan pabrik.
3. Aminah Noviani (2014) membahas Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro, perlakuan alokasi biaya lingkungan yang dilakukan oleh RS Mardi Waluyo dilakukan oleh bagian keuangan RS secara langsung berdasarkan analisis neraca dan laba rugi pada laporan keuangan rumah sakit Mardi Waluyo Metro, dapat diketahui bahwa elemen yang terkait dengan pengelolaan lingkungan belum tersaji secara eksplisit di dalam laporan keuangan

sebab elemen tersebut masih tergabung dengan elemen lainnya yang dianggap satu kategori.

4. H Andre Purwanugraha (2013), Analisis Biaya Lingkungan pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Pada penelitian ini membahas aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan RSUD Dr. Moewardi dalam mengelola lingkungan berdasarkan hasil analisis aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh RSUD Dr. Moewardi dalam mengelola lingkungan selama tahun 2013 yaitu penyehatan raung dan bangunan, penyehatan makanan, pengelolaan sampah dsb, dalam pengelompokkan biaya lingkungan kedalam komponen biaya berdasarkan IFAC di bagi menjadi enam kategori yaitu salah satunya biaya material dari out produk, tidak ada biaya yang terkait dengan biaya tersebut. Selanjutnya biaya lingkungan yang terjadi selama tahun 2013 yaitu sebesar Rp 4.243.849.268,00 atau 1,21% dari total biaya operasional rumah sakit.
5. Fika Erisya Islamey (2016), Perlakuan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengelolaan Limbah pada Rumah Sakit Paru Jember dari hasil penelitian tersebut terdapat dua macam limbah yang ditemukan dalam penelitian tersebut yaitu limbah padat dan limbah cair. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah tersebut diakui pada saat terjadinya transaksi yang disajikan dan diungkapkan ke dalam laporan operasional rumah sakit, tetapi rumah sakit paru jember tidak membuat laporan khusus untuk pengelolaan limbah dan rumah sakit paru jembar dalam mengidentifikasi, mengukur, menilai, menyajikan dan

mengungkapkan mengenai kegiatan pengolahan limbahnya dalam akuntansi menggunakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Namun secara tidak langsung pihak rumah sakit sudah mengikuti teori dan standar akuntansi keuangan yang ada.

6. Adi Indrawati (2010), *Perlakuan Akuntansi Biaya Pengolahan Limbah Cair dalam Laporan*, berdasarkan hasil penelitian komponen biaya pengolahan limbah yaitu antara lain biaya pemeliharaan instalasi air pengolah limbah, biaya pemeliharaan instalasi listrik pengolah limbah, biaya analisa limbah, pembelian bahan pembantu pengolah limbah, biaya kimia untuk pembekuan udang, dan biaya angkut limbah padat. Perusahaan juga belum membuat laporan biaya lingkungan secara khusus, meskipun demikian sebenarnya item-item biaya lingkungan yang ada didalamnya mencakup biaya pengolahan limbah sudah diakui dan disajikan dalam laporan keuangan umum perusahaan. Total biaya pengolahan limbah selama tahun 2010 adalah sebesar Rp. 158.781.000,00 adapun perusahaan hanya mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan lingkungan dalam laporan manajemen dan bersifat kualitatif. Sedangkan mengenai kebijakan akuntansi, kegiatan dan kewajiban bersyarat sehubungan dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup (PLH) belum diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan
7. Aristha Purwanthari Sawitri (2017), *Analisis Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap*

Nilai Perusahaan berdasarkan pada hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan akuntansi lingkungan berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

8. Holly Devianti (2012), Evaluasi Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Dalam Perspektif PT Timah (Persero) Tbk, berdasarkan hasil penelitian peranan akuntansi lingkungan diperlukan dalam setiap tahap yang berada di *supply chain* perusahaan. Namun, perusahaan belum menerapkan akuntansi lingkungan secara penuh. Secara garis besar, cukup banyak data perusahaan yang dapat digunakan untuk menunjang penerapan akuntansi lingkungan. Tidak terlihat sistem informasi yang mengintegrasikan data lingkungan dengan data ekonomi. Perusahaan belum mengonversikan satuan unit menjadi satuan moneter atas efisiensi biaya yang diperoleh dari pengolahan limbah dan energi alternatif. PT Timah menyiapkan anggaran pada tahun 2009, sekitar Rp26,6 miliar untuk pelaksanaan program CSR yang merupakan dana yang wajib dicadangkan bagi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA). Dari segi pemberdayaan lingkungan dan bentuk pertanggungjawaban perusahaan untuk memulihkan fungsi lahan yang telah digunakan untuk pertambangan sebelumnya. PT Timah telah mengambil langkah yang cukup baik untuk menjaga kelestarian lingkungan pasca pertambangan. Sepanjang tahun 2010–2012, Perusahaan merencanakan reklamasi seluas 2.000 ha per tahun selama 2

tahun mendatang. Berdasarkan atas berbagai evaluasi dalam perencanaan, dan pelaporan keuangan, dan bentuk realisasi kerja sama bina lingkungan PT Timah dapatlah disimpulkan bahwa PT Timah adalah perusahaan yang cukup mempertimbangkan keamanan lingkungan secara optimal. Walaupun secara garis besar bahwa Provinsi Bangka Belitung sudah dalam kondisi kritis terkait dengan kondisi kerusakan hutan, pencemaran air, atau banyaknya alih profesi dari mayoritas nelayan menjadi penambang konvensional (TI)

9. Susiana sari (2013), Penerapan Akuntansi Lingkungan Untuk Mengoptimalkan Tanggung Jawab Industri Gula, Hasil analisis menunjukkan bahwa Pabrik Gula Lestari lebih besar di biaya pencegahan dan biaya nilai tambah. Besarnya biaya pencegahan menunjukkan bahwa Pabrik Gula Lestari lebih mengoptimalkan pada biaya bimbingan teknis dan koordinasi lingkungan sedangkan pada nilai tambah menunjukkan bahwa Pabrik Gula Lestari mengeluarkan biaya untuk pengelolaan limbah yang dapat memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat sekitar pabrik. Pada biaya penilaian dan kesalahan internal menunjukkan bahwa perlunya penambahan untuk biaya pemeliharaan alat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta *Bowler* karena perlunya perawatan pada alat tersebut agar mengoptimalkan pengelolaan limbah sehingga menghemat biaya untuk biaya pembersihan alat tersebut. Pabrik Gula Lestari telah menerapkan program tanggung jawab sosial untuk

masyarakat antara lain program natura, program pasar murah, program kerohanian, program pelatihan dan keterampilan serta program penghijauan. Pemberian bantuan ini diberikan untuk 1.200 kartu keluarga. Selain pemberian bantuan Pabrik Gula Lestari memberikan pula hasil limbahnya berupa limbah cair, blotong dan abu ketel yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pupuk, bahan bakar batu bata, pengganti LPG untuk keperluan sehari masyarakat. Adanya beberapa bantuan dari Pabrik Gula Lestari ini membangkitkan perekonomian masyarakat hal ini dikarenakan adanya bantuan limbah ini membantu penghematan pengeluaran untuk pertanian warga hampir 50%.

10. Susanti (2014), Analisa Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Rumah Sakit RK. Charitas Palembang. Adapun hasil penelitiannya yaitu :

- a. Perlakuan alokasi biaya lingkungan yang dilakukan oleh RK. Charitas Palembang oleh bagian keuangan dan logistik Rumah Sakit secara langsung dengan bagian sanitasi lingkungan yang diakui sebagai salah satu asset tetap (aktiva tetap) rumah sakit.
- b. Pengelolaan limbah RK. Charitas Palembang sudah mengikuti prosedur yang berlaku di rumah sakit, keadaan lingkungannya sehat atau normal terlihat dari hasil penelitian atau evaluasi kinerja yang telah dilakukan oleh pihak RK. Charitas Palembang dan pihak-pihak ketiga yang diajak kerjasama.

E. Kerangka Teori

Akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan, sebagai alat manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Akuntansi lingkungan ini juga merupakan bidang ilmu akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan akuntansi lingkungan.⁵

Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas yang buruk. Maka, biaya lingkungan berhubungan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan pencegahan degradasi lingkungan. Mengelompokkan biaya aktivitas lingkungan sesuai dengan kategori biaya kualitas lingkungan berdasarkan teori Hansen dan Mowen yaitu biaya pencegahan, biaya pendeteksian, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal.⁶

Standar akuntansi mengenai pengungkapan akuntansi lingkungan di Indonesia masih belum efektif karena tidak diatur secara khusus dalam standar akuntansi. Pelaporan biaya lingkungan masih bersifat sukarela dan di luar standar akuntansi keuangan. Hal ini dijelaskan dalam PSAK No. 1 (Revisi 2013) Tahun 2015, paragraph empat belas (14) yang menyatakan: “Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna

⁵Ikhsan Arfan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm 21

⁶Hansen Mowen, *Akuntansi Manajerial*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm 413

laporan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar dari ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Adapun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 hingga 4 menyatakan: (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dalam memperhatikan kepatutan dan kewajaran, (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat menguraikan, menggambarkan dan membandingkan data satu dengan data yang lainnya untuk di tarik suatu kesimpulan.⁷

b. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.38

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti dalam hal ini dilakukan wawancara langsung dengan kepala bagian akuntansi keuangan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁸ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu profil perusahaan, serta data laporan keuangan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dengan metode pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan pencapaian masalah secara valid dan terpercaya yang akhirnya akan memungkinkan generalisasi yang obyektif. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data merujuk kepada Sugiyono yaitu:⁹

1. Wawancara

⁸Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2011), hlm 194

⁹Sugiyono, 2011. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta hlm 193

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dengan cara melakukan wawancara melalui tatap muka maupun menggunakan telepon. Teknik ini dilakukan dengan wawancara kepada karyawan yang mempunyai wewenang dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya yang ada pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung.¹⁰

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik analisis data yang dilakukan setelah peneliti memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi terkait perlakuan akuntansi Lingkungan atas biaya pengelolaan limbah pabrik pada PT Perkebunan Nusantara VII (PERSERO) PPKS Unit Usaha Betung. Analisis data sangat penting untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Ada beberapa langkah yang dilakukan peneliti dalam analisis data adalah sebagai berikut :

¹⁰*Ibid.*, hlm 194

1. Mengumpulkan data berupa dokumen arsip, hasil wawancara dan observasi kemudian disusun secara sistematis untuk menentukan dokumen yang relevan dijadikan sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah
2. Menganalisis setiap biaya-biaya lingkungan terkait dengan pengolahan limbah pabrik perusahaan. Dalam hal ini peneliti menganalisis item-item yang terkait dengan biaya lingkungan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung yang meliputi biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal sesuai dengan teori Hansen Mowen.
3. Mengidentifikasi pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian biaya-biaya yang berkaitan dengan pengolahan limbah pabrik kemudian dibandingkan dengan PSAK Tahun 2015
4. Menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dikembangkan ke dalam lima bab. Untuk mempermudah pembahasan setiap bab, maka dibuat intisari dari tiap bab. Pemisahan dari ke lima bab tersebut dirangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan secara teoritis tentang perlakuan akuntansi lingkungan mulai dari pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan yang kemudian akan diketahui tujuan perlakuan akuntansi tersebut

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tempat penelitian, deskripsi objek penelitian, deskripsi geografis, deskripsi demografi, dan lain-lain

BAB IV : ANALISIS TERHADAP OBJEK PENELITIAN

Bab ini menganalisis data lalu menginterpretasikan menjadi sebuah makna yang bisa menjadi bahan untuk menyimpulkan dari penelitian ini.

BAB V : KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, saran-saran, daftar pustaka serta lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Akuntansi Lingkungan

Akuntansi Lingkungan adalah istilah luas yang digunakan dalam jumlah konteks yang berbeda, seperti:

1. Penilaian dan pengungkapan lingkungan terkait informasi keuangan dalam konteks akuntansi keuangan dan pelaporan.
2. Penilaian dan penggunaan lingkungan terkait informasi fisik dan keuangan dalam konteks akuntansi manajemen lingkungan.
3. Estimasi atas dampak eksternal lingkungan dan biaya-biaya, sering mengacu pada full cost accounting (FCA).¹¹

Sedangkan akuntansi lingkungan atau “*environmental accounting*” menurut Djogo(2009) adalah istilah umum yang bersangkutan dengan biaya lingkungan terhadap setiap praktek akuntansi baik di lembaga pemerintah maupun di perusahaan. Biaya tersebut merupakan hasil dari akibat segala kegiatan perusahaan yang bersangkutan yang berkaitan dengan lingkungan. Pada dasarnya akuntansi lingkungan memang berfokus pada biaya pengembangan atau

¹¹Ikhsan Arfan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, (yogyakarta: Graha Ilmu, 2009) hlm 16

perawatan lingkungan khususnya pada perusahaan atau lembaga yang fokus utama pekerjaan mereka berhubungan dengan lingkungan.

Misalnya seperti perusahaan, semua perusahaan pasti menghasilkan limbah. Limbah dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan itu termasuk kategori limbah yang berbahaya. Menurut akuntansi lingkungan mereka harus mengalokasikan dana untuk mengelola limbah tersebut agar tidak membahayakan lingkungan yang ada di sekitarnya.¹²

Berdasarkan pendapat diatas bisa dijelaskan bahwa akuntansi lingkungan adalah aktivitas jasa yang memiliki peranan untuk menyediakan informasi akuntansi yang dapat dipengaruhi oleh respon perusahaan terhadap masalah yang mengancam tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

B. Tujuan Akuntansi Lingkungan

Tujuan dari akuntansi lingkungan adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya. Keberhasilan akuntansi lingkungan tidak hanya tergantung pada ketepatan dalam menggolongkan semua biaya-biaya yang dibuat perusahaan. Akan tetapi kemampuan dan keakuratan data akuntansi perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas perusahaan. Di samping itu, maksud dan tujuan di kembangkannya akuntansi lingkungan antara lain meliputi:¹³

¹²Solihin, I. *Corporates Social responsibility, from charity to sustainability*, Jakarta ; Salemba Empat, 2009, hlm 14

¹³Ikhsan Arfan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm 21

1. Akuntansi lingkungan merupakan sebuah alat manajemen lingkungan, sebagai alat manajemen lingkungan. Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi lingkungan. Data akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menentukan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan dan juga investasi yang diperlukan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan.
2. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat, sebagai alat komunikasi publik, akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.

C. Pentingnya Akuntansi Lingkungan

Ada beberapa alasan kenapa perusahaan perlu untuk mempertimbangkan akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan, antara lain:

1. Memungkinkan secara signifikan mengurangi dan menghapus biaya-biaya lingkungan.
2. Biaya dan manfaat lingkungan mungkin kelihatannya melebihi jumlah nilai rekening/akun.
3. Memungkinkan pendapatan dihasilkan dari biaya-biaya lingkungan.

4. Memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang selama ini mungkin mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan keberhasilan bisnis perusahaan.
5. Diharapkan menghasilkan biaya atau harga yang lebih akurat terhadap produk dari proses lingkungan yang diinginkan.
6. Memungkinkan keuntungan yang lebih bersaing sebagaimana pelanggan mengharapkan produk/jasa lingkungan yang lebih bersahabat.
7. Dapat mendukung pengembangan dan jalannya sistem manajemen lingkungan yang menghendaki aturan untuk beberapa jenis perusahaan.¹⁴

D. Fungsi Dan Peran Akuntansi Lingkungan

Pentingnya penggunaan akuntansi lingkungan bagi perusahaan atau organisasi lainnya dijelaskan dalam fungsi dan peran akuntansi lingkungan. Fungsi dan peran ini dibagi ke dalam dua bentuk. Fungsi pertama disebut dengan fungsi internal dan fungsi kedua disebut dengan fungsi eksternal. Masing-masing fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi Internal

Fungsi internal merupakan fungsi yang berkaitan dengan pihak internal perusahaan sendiri. Pihak internal adalah pihak yang menyelenggarakan usaha, seperti rumah tangga konsumen dan rumah tangga produksi maupun jasa lainnya. Adapun yang menjadi aktor dan faktor dominan pada fungsi internal ini adalah pimpinan perusahaan. Sebab pimpinan perusahaan merupakan orang yang bertanggungjawab

¹⁴Ikhsan Arfan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*,(yogyakarta:Graha Ilmu, 2009) hlm 14

dalam setiap pengambilan keputusan maupun penentuan setiap kebijakan internal perusahaan. Sebagaimana halnya dengan sistem informasi lingkungan perusahaan, fungsi internal memungkinkan untuk mengatur biaya konservasi lingkungan dan menganalisis biaya dari kegiatan-kegiatan konservasi lingkungan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan pengambilan keputusan. Dalam fungsi internal ini diharapkan akuntansi lingkungan berfungsi sebagai alat manajemen bisnis yang dapat digunakan oleh manager ketika berhubungan dengan unit-unit bisnis.

2. Fungsi eksternal

Fungsi eksternal merupakan fungsi yang berkaitan dengan aspek pelaporan keuangan. Pada fungsi ini faktor penting yang perlu diperhatikan perusahaan adalah pengungkapan hasil dari kegiatan konservasi lingkungan dalam bentuk data akuntansi. Informasi yang diungkapkan merupakan hasil yang diukur secara kuantitatif dari kegiatan konservasi lingkungan.

Fungsi eksternal memberi kewenangan bagi perusahaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan stakeholders, seperti pelanggan, rekan bisnis, investor, penduduk lokal maupun bagian administrasi. Oleh sebab itu, perusahaan harus memberikan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atas pemakaian sumber ekonomi yang dipercayakan kepadanya.

Diharapkan dengan publikasi hasil akuntansi akan berfungsi dan berarti bagi perusahaan-perusahaan dalam memenuhi pertanggungjawaban

serta transparansi mereka bagi para *stakeholders* yang secara simultan sangat berarti untuk kepastian evaluasi dari kegiatan konservasi lingkungan. Para *stakeholder* diharapkan dapat menganalisa data akuntansi lingkungan dari perspektif isu-isu yang penuh unsur risiko, keberadaan dari perspektif kegiatan lingkungan serta apa yang dihasilkan, dampak rinci dari lingkungan yang tersembunyi dan ukuran pencegahannya, maupun isu-isu pertanggungjawaban sosial lainnya.¹⁵

Maka dengan itu, baik fungsi internal maupun fungsi eksternal pada dasarnya merupakan satu kesatuan utuh (*holistic*) yang menghubungkan antar perusahaan dengan masyarakat maupun dengan lingkungan.

E. Definisi Biaya Lingkungan

Menurut Hansen dan Mowen, biaya lingkungan dapat disebut biaya kualitas lingkungan (*environmental quality costs*). Biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. Biaya lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut :¹⁶

1. Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah diproduksinya limbah dan/ atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Contoh-contoh aktivitas pencegahan: evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari

¹⁵Ikhsan Arfan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm 32

¹⁶Hansen Mowen, *Akuntansi Manajerial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 413

dampak lingkungan, audit risiko lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, serta pemerolehan sertifikasi ISO 14001 (sertifikasi dari standar internasional yang ditetapkan secara khusus).

2. Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan bahwa produk, proses, dan aktivitas lain di perusahaan telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan dalam tiga cara : peraturan pemerintah, standar sukarela (ISO 14001) yang dikembangkan *Internasional Standards Organization*, dan kebijakan lingkungan yang dikembangkan manajemen. Contoh-contoh aktivitas deteksi adalah audit aktivitas lingkungan, pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan), pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian pencemaran, verifikasi kinerja lingkungan dari pemasok, serta pengukuran tingkat pencemaran.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmentsl internal failure costs*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke lingkungan luar. Jadi, biaya kegagalan internal terjadi untuk menghilangkan dan mengolah limbah dan sampah ketika diproduksi. Contoh-contoh aktivitas kegagalan internal adalah pengoperasian peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi, pengolahan dan pembuangan limbah beracun, pemeliharaan

peralatan polusi, lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah, serta daur ulang sisa bahan.

4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure*) adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya kegagalan eksternal yang direalisasi (*realized external failure costs*) adalah biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. Biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan (*unrealized external failure costs*) atau biaya sosial disebabkan oleh perusahaan, tetapi dialami dan dibayar oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh biaya kegagalan eksternal yang direalisasi adalah pembersihan danau yang tercemar, pembersihan minyak yang tumpah, pembersihan tanah yang tercemar, menyelesaikan klaim kecelakaan pribadi (yang berhubungan dengan lingkungan), merestorasi tanah ke keadaan alamiahnya, dan hilangnya penjualan karena reputasi lingkungan yang buruk. Contoh biaya kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan mencakup perawatan medis karena udara yang terpolusi (kesejahteraan individu), hilangnya kegunaan danau sebagai tempat rekreasi karena pencemaran (degradasi), hilangnya lapangan pekerjaan karena pencemaran (kesejahteraan individual), dan rusaknya ekosistem karena pembuangan sampah padat (degradasi).

F. Tahap- Tahap Perlakuan Alokasi Biaya Lingkungan

Sebelum mengalokasikan pembiayaan untuk pengelolaan dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, pencemaran

udara, pencemaran suara dan efek sosial lainnya, perusahaan perlu merencanakan tahap pencatatan pembiayaan tersebut. Tahap-tahap ini dilakukan agar dalam pengalokasian anggaran yang telah direncanakan untuk satu periode akuntansi dapat diterapkan dengan efektif dan efisien. Pencatatan pembiayaan untuk mengelola sampah-sampah yang dikeluarkan dari hasil sisa produksi suatu usaha dialokasikan dalam tahap-tahap tertentu yang masing-masing tahap memerlukan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan, dan tahap-tahap pencatatan itu dapat dilakukan sebelum periode akuntansi berjalan sesuai dengan proses produksi yang dilakukan perusahaan tersebut (Munn dalam Haryanto dalam Hadi, 2012 : 214)

Pencatatan untuk mengelola segala macam yang berkaitan dengan limbah sebuah perusahaan didahului dengan perencanaan yang akan dikelompokkan dalam pos-pos tertentu sehingga dapat diketahui kebutuhan riil setiap tahunnya.

Pengelompokkan dalam tahap analisis lingkungan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan standar akuntansi keuangan (PSAK, 2015) antara lain sebagai berikut :

- a. Identifikasi
- b. Pengakuan
- c. Penyajian
- d. Pengungkapan

Ad a. Identifikasi

Pertama kali perusahaan akan menentukan biaya untuk pengelolaan biaya penanggulangan *eksternality* yang mungkin terjadi dalam kegiatan operasional usahanya adalah dengan mengidentifikasi dampak negatif tersebut. Sebagai

contoh misalkan sebuah pabrik yang diperkirakan akan menghasilkan limbah berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus untuk hal tersebut mengidentifikasi limbah yang mungkin ditimbulkan antara lain : limbah padat, limbah cair maupun limbah gas yang berasal dari kegiatan pabrik atau pun karyawan.

Sistem akuntansi secara khusus membagi biaya seperti biaya bahan dan tenaga kerja, biaya manufaktur atau overhead pabrik (biaya operasional), biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, biaya riset dan pengembangan.¹⁷

Ad b. Pengakuan

Apabila sudah diidentifikasi selanjutnya diakui sebagai akun atau rekening biaya pada saat penerimaan manfaat dari sejumlah nilai yang telah dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan tersebut. Menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 82 Tahun 2015, pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang. Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 83 Tahun 2015, menyatakan bahwa pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika :¹⁸

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari/ke dalam perusahaan.
- b. Pos tersebut mempunyai nilai/biaya yang dapat diukur dengan andal.

Ad c. Pengukuran

¹⁷ Ikhsan Arfan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hlm 30

¹⁸ *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015* (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2014) hlm 14

Menurut suwardjono pengukuran (measurement) adalah penentuan angka atau satuan pengukur terhadap suatu objek untuk menunjukkan makna tertentu dari objek tersebut. pada umumnya, perusahaan mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah ditetapkan sebelumnya dan sebesar yang di keluarkan. Sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.

Menurut Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) diungkapkan bahwa :¹⁹

“Pengukuran adalah proses penetaan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.”

Berdasarkan dasar pengukuran tersebut adalah berikut :²⁰

- a. Biaya Historis
- b. Biaya Kini (*Current Cost*)
- c. Nilai Realisasi / penyelesaian (*Realizable / Settlement Value*)
- d. Nilai Sekarang (*Present Value*)

Ad d. Penyajian

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat laporan keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu

¹⁹Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015 , Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, hlm 17

²⁰Ibid hlm

informasi objek harus disajikan secara terpisah dari laporan utama, apakah suatu informasi harus disajikan digabung dengan akun laporan keuangan yang lain.²¹

Menurut PSAK No.1 paragraf 14 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan mengungkapkan bahwa :²²

“beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri, dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting.

Perusahaan dapat menyajikan kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan guna membantu menciptakan kesan positif terhadap perusahaan dimata pemodal, pemerintah, dan masyarakat. Model komprehensif yang dapat dijadikan sebagai alternatif model pelaporan keuangan lingkungan secara garis besar dapat dikategorikan dalam 4 (empat) macam model, antara lain

1. Model Normatif

Model ini berawal dari premis bahwa perusahaan akan membayar segalanya. Model normatif mengakui dan mencatat biaya-biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Biaya-biaya serumpun tersebut disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangannya.

2. Model Hijau

²¹Suwardjono, *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE , 2013 hlm 22

²²*Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015* , Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, hlm 14

Model hijau menetapkan biaya dan manfaat tertentu atas lingkungan bersih. Selama suatu perusahaan menggunakan sumber daya, perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya sebesar konsumsi atas biaya sumber daya. Proses tersebut memaksa perusahaan menginternalisasikan biaya pemakaian sumber daya meskipun mekanisme pengakuan dan pengungkapan belum memadai dan kemudian melaporkan biaya tersebut dalam laporan keuangan yang terpisah dari laporan keuangan induk untuk memberikan penjelasan mengenai pembiayaan lingkungan di perusahaannya.

3. Model Intensif Lingkungan

Model pelaporan ini mengharuskan adanya pelaksanaan kapitalisasi atas biaya perlindungan dan reklamasi lingkungan. Pengeluaran akan disajikan sebagai investasi atas lingkungan sedangkan aktiva terkait lingkungan tidak didepresiasi dengan sehingga dalam laporan keuangan selain pembiayaan yang diungkapkan secara terpisah, juga memuat mengenai catatan-catatan aktiva tetap yang berhubungan dengan lingkungan yang dianggap sebagai investasi untuk lingkungan.

4. Model Aset Nasional

Model aset nasional mengubah sudut pandang akuntansi dari tingkat perusahaan (skala mikro) ke tingkat nasional (skala makro), sehingga dimungkinkan untuk meningkatkan tekanan terhadap akuntansi untuk persediaan arus sumber daya alam. Dalam model ini dapat ditekankan bahwa selain memperdulikan lingkungan dalam

pengungkapannya secara akuntansi, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk menginterpretasikan pembiayaan lingkungan tersebut sebagai aset nasional yang dipandang sebagai tanggung jawab secara nasional.

Variasi alternatif model dalam perbedaan materi yang diungkap antar perusahaan satu dengan perusahaan yang menganut model lainnya lebih banyak disebabkan oleh faktor tingkat kompleksitas dan tingkat kebutuhan masing-masing operasional usaha. Perusahaan dapat memilih alternatif model variasi dalam menentukan sikap dan bentuk tanggung jawab sosialnya sesuai dengan proporsional masing-masing, namun secara substansial bahwa pertanggungjawaban lingkungan tetap menjadi pertimbangan utama setiap perusahaan.

Ad e. Pengungkapan

Pengungkapan (*disclosure*) berkaitan dengan cara pembebanan atau penjelasan hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Memuat standar akuntansi yang berisi tentang informasi atau objek harus disajikan secara terpisah dari statemen utama, apakah suatu pos perlu dirinci atau apakah suatu informasi cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki (*Footnote*)²³

Menurut Ikhsan, pengungkapan memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan hal tersebut dapat diartikan sebagai memberikan data untuk

²³Suwardjono, *Teori Akuntansi : Perekayasaan Pelaporan Keuangan*, Yogyakarta: BPFE , 2013 hlm 22

mencapai tujuan pelaporan keuangan.²⁴ Menurut PSAK No. 1 paragraf 117 Tahun 2015 tentang Penyajian Laporan Keuangan, bahwa:²⁵

“Entitas dapat mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan lebih memahami laporan keuangan.”

G. Dasar Hukum Akuntansi Lingkungan di Indonesia

Ada beberapa dasar hukum yang mengatur Akuntansi Lingkungan, di antaranya :

1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam peraturan yang tercantum dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 ini menunjukkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Akuntansi Lingkungan yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan (Pasal 6 Ayat 1)
- b. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 6 Ayat 2)
- c. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan (Pasal 16 Ayat 1)

²⁴Ikhsan Arfan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009, hlm 19

²⁵*Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*, Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, hlm.122

- d. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (Pasal 17 Ayat 1)
 - e. Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Pasal 41 Ayat 1)
 - f. Barang siapa yang karena kelalaian melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Pasal 42 Ayat 1)
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 hingga 4 menyatakan:
- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
 - b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dalam memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dalam peraturan tentang Penanaman Modal yang tercantum, menunjukkan beberapa ketentuan UU ini yang berkaitan dengan Akuntansi Lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 15 menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk:
 - 1. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - 2. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal
- b. Pasal 16 menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab:
 - 1. Menjaga kelestarian lingkungan hidup
 - 2. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.
- c. Pasal 34 Ayat 1 menyatakan bahwa badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 yang tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

H. Perspektif Islam Tentang Akuntansi Lingkungan

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Apabila masyarakat muslim memahami bahwa interaksi yang benar dengan lingkungan juga merupakan ibadah mungkin kerusakan lingkungan tidak akan sebesar yang terjadi saat ini. Pada dasarnya, permasalahan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh dua hal yaitu pertama, karena kejadian alam yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam, kedua adalah sebagai akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.

Eksplorasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan menimbulkan kerusakan yang akhirnya juga mengancam eksistensi manusia. Berkaitan dengan hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat 41 yang berbunyi :

﴿يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُوا الَّذِي بَعْضَ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسُ أَيَّدَى كَسَبَتْ مِمَّا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ﴾

Artinya “telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad* itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan.²⁶

Oleh sebab itu, dalam memanfaatkan bumi ini tidak boleh semena-mena dan seenaknya saja dalam mengeksploitasinya. Pemanfaatan berbagai sumber daya alam baik yang ada di laut, didaratan dan didalam hutan harus dilakukan secara proporsional dan rasional untuk kebutuhan masyarakat banyak dan generasi penerusnya serta menjaga ekosistemnya. Allah sudah memperingatkan dalam surat al A'raf ayat 56 yang berbunyi:

﴿الْمُحْسِنِينَ ۖ قَرِيبٌ إِلَّهِ رَحْمَتُهُ ۖ وَأَدْعُوهُ ۖ صَلَاحُهَا بَعْدَ الْأَرْضِ ۖ فَتُفْسِدُوا وَلَا



Artinya: “Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia agar senantiasa menjaga lingkungan sekitarnya, bukan malah merusaknya dengan

²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol 11, cet 1 hlm 77

mencemarinya sehingga akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat merusak alam dan merugikan masyarakat sekitar.

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)PPKS Unit Usaha Betung yang berlokasi Jl. Raya Sekayu Km 75 Betung, Palembang, Sumatera Selatan.

B. Profil Objek Penelitian

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan Indonesia. Perseroan ini berkantor pusat di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 dan Akte Notaris Harun Kamil, SH No. 40 tanggal 11 Maret 1996. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) merupakan salah satu sasaran pembangunan pemerintah yang terus dikembangkan untuk meningkatkan devisa Non Migas mencakup keperluan dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja.

PT Perkebunan Nusantara VII Unit Betung merupakan satu dari 7 (tujuh) unit usaha yang berada dalam wilayah kerja Distrik Sumatera Selatan (D.SSL) PTPN VII diantaranya :Unit Talang Sawit, Unit Betung Krawo, Unit Bentayan, Unit Tebenan, Unit Musi Landas, dan Unit Cinta Manis.PT Perkebunan Nusantara VII Unit Betung, merupakan tanah hak Erfacht Ex. N.V. Maatschappij Tot Exploitatie Der Cultuur Ondernemingen Van Emoorman En Compagnie, yang atas dasar Undang-undang Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958 dan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1959. Tanah Hak Erfacht dimaksud menjadi tanah Negara yang selanjutnya dikuasai dan dikelola oleh PTPerkebunan Nusantara VII Unit Betung.

C. Deskripsi Kegiatan Perusahaan

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Unit Betung sudah beroperasi sejak tahun 1982 dengan Kapasitas 30 - 60 ton TBS/jam .PTPerkebunan Nusantara VII Unit Betungmerupakan salah satu Unit di lingkup PTPNVII yang mengelola 1 unit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit yang didukung dengan areal tanaman Kelapa Sawit seluas 3.185,2 Ha.

D. Visi Dan Misi Perusahaan

a. Visi PT Perkebunan Nusantara VII

PT Perkebunan Nusantara VII menjadi perusahaan agribisnis yang tangguh dengan tata kelola yang baik

b. Misi PT Perkebunan Nusantara VII

1. Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit. Teh dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang berkelanjutan, lestari dan ramah lingkungan.
2. Menghasilkan produksi bahan baku dan bahan jadi untuk industri yang bermutu tinggi untuk pasar domestik dan pasar ekspor.
3. Mewujudkan daya saing produk yang dihasilkan melalui tata kelola usaha yang efektif guna menumbuh kembangkan perusahaan.
4. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis inti (karet, kelapa sawit, teh dan tebu) dengan menggunakan teknologi terbaru
5. Melakukan pengembangan bisnis berdasarkan potensi sumberdaya yang dimiliki perusahaan.
6. Memelihara keseimbangan kepentingan stakeholders untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif

E. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan landasan dalam melaksanakan tugas darimasing-masing bagian dalam suatu organisasi agar setiap pegawai didalamnya dapat bekerja sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya masing-masing. Struktur organisasi merupakan sebuah susunan unit tugas dan pekerjaan setiap pegawai dalam suatu organisasi. Adapun struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung dapat dilihat pada lampiran 1.1

F. Uraian Tugas

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung dalam menjalankan usahanya telah menyusun sebuah struktur organisasi didalamnya

terdiri dari beberapa bagian yang bertanggung jawab terhadap semua yang menjadi kewajibannya. Adanya struktur organisasi ini diharapkan akanmemperlancar aktivitas lembaga secara rutin, dengan uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Manajer Unit

Manajer Unit mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin dan mengelola unit usaha dengan berpedoman pada kebijakan direksi dan secara kreatif mengimplementasikan dan mengembangkan kebijakan direksi untuk kemajuan perusahaan.
- 2) Menerapkan dan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan perusahaan di undang-undang sehingga tidak terjadi penyimpangan.
- 3) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan produksi dan kegiatan operasional di unit usaha yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperoleh keuntungan bagi perusahaan.
- 4) Melakukan pengendalian biaya di unit usaha secara tepat sehingga kegiatan-kegiatan produksi dan penunjang di unit usaha dapat berjalan dengan lancar tetapi dengan biaya yang terkendali.
- 5) Mengawasi pencapaian target kuantitas dan mutu hasil kerja bidang Tanaman, Teknik, Pengolahan, Keuangan serta SDM dan Umum di Unit Usaha.
- 6) Menjaga dan mengelola aset-aset perusahaan di unit usaha secara efektif dan efisien.

- 7) Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pekerja unit usaha dan memotivasi pekerja untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal.
- 8) Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan harmonis di unit usaha.
- 9) Memonitor dan mengendalikan dampak kegiatan unit usaha terhadap masyarakat sekitar misalnya pengendalian dampak lingkungan hidup akibat kegiatan produksi, kecemburuan sosial dll.
- 10) Mengkoordinir dan mengawasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Kerja Operasional (RKO), dan Surat Permintaan Modal Kerja (SPMK).
- 11) Berwenang mengatur pelaksanaan tugas pekerja di unit usaha sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku, memberikan pembinaan, teguran, *reward* dan *punishment* kepada pekerja unit usaha.

2. Asisten Kepala Tanaman

Asisten Kepala Tanaman mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memeriksa rencana kerja harian dalam pengelolaan tanaman.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan di bidang tanaman baik pelaksanaan, pemeliharaan maupun pelaksanaan panen dalam rangka pengadaan produksi Tandan Buah Segar (TBS).
- 3) Memeriksa dan mengesahkan laporan mingguan tentang keadaan hama dan penyakit, pelaksanaan, pemeliharaan, pemupukan dan pengendalian hama gulma.
- 4) Memantau penggunaan kerja oleh tiap-tiap bagian.
- 5) Memberikan pengarahan kepada bawahan tentang pelaksanaan pekerjaan.

- 6) Mengendalikan keamanan dan ketenangan pekerja di bidang tanaman.
- 7) Memeriksa laporan perolehan produksi kelapa sawit.

3. Asisten Tanaman

Asisten Tanaman mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkomplikasi laporan administrasi dari setiap bagian.
- 2) Meneruskan bon permintaan barang atau bahan gudang yang dibuat oleh bidang masing-masing.
- 3) Memeriksa data-data tiap bagian jika terjadi ketidak sesuaian atau kesalahan.
- 4) Memberi saran-saran positif kepada atasan untuk memperlancar aktivitas di bidang tanaman.
- 5) Merekap rencana jadwal panen, rencana pemupukan.

4. Mandor Besar

Mandor Besar mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu asiten tanaman menyusun rencana kerja harian di afdeling.
- 2) Mengawasi mutu panen dan menilai kelas panen.
- 3) Membuat laporan pekerjaan pemeliharaan tanaman pada buku merumput.
- 4) Melaporkan prestasi hasil kegiatan kepada atasan langsung termasuk kelancaran dan hambatan yang ditemui.
- 5) Mengkoordinir pelaksanaan pemberantasan serangan hama dan penyakit.

- 6) Memberikan pengarahan dan teguran lisan kepada bawahan jika terjadi penyimpangan.
- 7) Menggunakan dan mengaplikasikan bahan kimia seperti insektisida dan pupuk sesuai norma.
- 8) Memeriksa dan mengamati produksi per pohon.

5. Sinder Teknik Mesin & Instalasi

Sinder Teknik Mesin dan Instalasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengamatan dan pemeriksaan terhadap laporan kerusakan peralatan pada stasiun pengolahan
- 2) Melaksanakan perawatan dan perbaikan atas kerusakan pada stasiun/peralatan pabrik
- 3) Mengawasi pekerjaan perbaikan yang dikoordinir mandor besar mesin dan instalasi
- 4) Mengajukan jenis dan number part pada peralatan yang rusak kepada sinka teknik/pengolahan
- 5) Memeriksa stok barang gudang yang berhubungan dengan penggantian spare part pada mesin-mesin dan instalasi pabrik
- 6) Mengatur pendistribusian/pembagian kerja kepada mandor besar, mandor dan pekerja pelaksana tentang pelaksanaan tugas sehari-hari
- 7) Membuat laporan kegiatan perawatan dan perbaikan mesin sesuai dengan sistem administrasi yang berlaku dan menyelesaikan laporan tepat pada waktu yang telah ditentukan

- 8) Melaksanakan kegiatan perbaikan peralatan pabrik dengan selalu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan undang-undang keselamatan kerja
- 9) Membina bawahan dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk tentang penggunaan peralatan pabrik dan peralatan keselamatan kerja
- 10) Menciptakan suasana kerja yang kondusif diantara para pekerja
- 11) Memeriksa buku laporan mabes yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan teknik
- 12) Membuat laporan kepada sinka teknik & pengolahan mengenai mesin-mesin dan instalasi pabrik.

6. Mandor Besar Teknik Dan Instalasi Air Dan Limbah

Mandor Besar Teknik dan Instalasi Air dan Limbah mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengamatan dan membuat laporan kerusakan instalasi listrik dan air/limbah
- 2) Melaksanakan perawatan dan perbaikan atas kerusakan instalasi listrik dan air/limbah
- 3) Mengawasi pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh mekanik
- 4) Menunjukkan spare part yang rusak pada atasan dan mengajukan permintaan spare part
- 5) Mengatur pendistribusian/pembagian kerja kepada mandor dan pekerja pelaksana tentang pelaksanaan tugas sehari-hari

- 6) Membuat laporan kegiatan perawatan dan perbaikan instalasi listrik dan air/limbah sesuai dengan sistem administrasi yang berlaku dan menyelesaikan laporan tepat pada waktu yang telah ditentukan
- 7) Melaksanakan kegiatan perbaikan instalasi listrik dan air/limbah dengan selalu menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan undang-undang keselamatan kerja
- 8) Membina bawahan dengan cara memberikan petunjuk-petunjuk tentang penggunaan peralatan, instalasi listrik dan air/limbah serta peralatan keselamatan kerja
- 9) Menciptakan suasana kerja yang kondusif diantara para pekerja
- 10) Memeriksa buku laporan mandor yang berkaitan dengan kegiatan pekerjaan teknik listrik dan instalasi air/limbah
- 11) Memuat laporan kepada atasan / sinder teknik listrik dan instalasi air/limbah mengenai instalasi listrik dan air/limbah

7. Asisten Kepala Administrasi Keuangan dan Umum

Asisten Kepala Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memeriksa rencana kerja harian dalam tata usaha dan keuangan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pekerjaan di bidang administrasi keuangan dan umum.
- 3) Memeriksa dan mengesahkan laporan mingguan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang (arus kas).

- 4) Memeriksa laporan di bidang administrasi keuangan dan umum serta bidang sumber daya manusia dan umum.

8. Asisten Tata Usaha dan Keuangan

Asisten Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang (arus kas).
- 2) Mengkoordinir pelaksanaan dan pengawasan keuangan, aktivitas administrasi dan keuangan.
- 3) Mengkoordinir surat masuk dan keluar.
- 4) Membuat analisis laporan keuangan dan perhitungan margin unit usaha.
- 5) Mengkoordinir pembuatan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), Laporan Manajemen (LM), Surat Permintaan Modal Kerja (SPMK), Rencana Operasional (RO), dan melaksanakan pembukuan dan administrasi serta penyusunan laporan.
- 6) Menyediakan data-data keuangan dan non keuangan untuk keperluan pelaporan.
- 7) Melakukan pembinaan dan pemberian sanksi teguran lisan kepada bawahan.
- 8) Mengatur penerimaan, penyimpanan, pengeluaran gudang produksi dan gudang material.
- 9) Melaksanakan administrasi pergudangan dan mengawasi penerimaan/pengeluaran persediaan barang gudang material.

- 10) Mengkoordinir pelaksanaan pembukuan dan administrasi serta penyusunan pelaporan.

9. Krani Kepala Keuangan

Krani Kepala Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat surat permintaan uang ke kantor direksi.
- 2) Memeriksa jurnal-jurnal pembukuan.
- 3) Memeriksa buku kas dan bank.
- 4) Meminta dan mengeluarkan kas kecil (*petty cash*).
- 5) Membuat perhitungan rugi/laba unit usaha.
- 6) Membantu penyelesaian administrasi/pembukuan koperasi.
- 7) Mengatur pelaksanaan tugas bawahannya secara efisien dan efektif.
- 8) Mengamankan aset perusahaan yang ada di lingkungan pekerjaannya.
- 9) Membuat evaluasi biaya.

10. Krani Kepala Gudang Material

Krani Kepala Gudang Material mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Meneliti dokumen penerimaan dan pengeluaran barang gudang.
- 2) Mengatur penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran gudang.
- 3) Memeriksa Laporan Pertanggungjawaban Barang (LPB) sesuai dengan jenis, jumlah dan kuantitas barang yang diterima.
- 4) Melayani pengeluaran barang gudang pada saat dibutuhkan secara mendesak.
- 5) Melaksanakan *stock* barang gudang material untuk keperluan laporan manajemen.

- 6) Menerima penerimaan barang sesuai spesifikasinya.
- 7) Mengatur penerimaan dan pengeluaran barang gudang material.
- 8) Membuat laporan *stock* barang gudang material untuk keperluan laporan manajemen.

11. Asisten Sumber Daya Manusia dan Umum

Asisten sumber daya manusia dan umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan dan mengawasi aktivitas administrasi bidang sumber daya manusia dan umum.
- 2) Melaksanakan program-program pembinaan sumber daya manusia di unit usaha.
- 3) Membuat laporan di bidang sumber daya manusia dan umum.
- 4) Mengkoordinir pembuatan RKAP, LM, SPMK, dan RO serta pengawasannya.
- 5) Melaksanakan tugas tim peningkatan produktivitas kerja bidang sumber daya manusia.
- 6) Mengatur pelaksanaan tugas bawahannya secara efisien dan efektif.
- 7) Melaksanakan tugas tim peningkatan produktivitas kerja di bidang sumber daya manusia dan umum.
- 8) Membuat konsep surat menyurat.

12. Krani Kepala Bidang SDM dan Umum

Krani Kepala Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membuat konsep surat menyurat, berita acara, surat perjanjian kerja, surat keputusan dan lain-lain.
- 2) Melaksanakan dan memberikan masukan mengenai pelaksanaan ketentuan ketenaga kerjaan.
- 3) Melaksanakan pemberian penghargaan dan sanksi kedisiplinan kepada pekerja sesuai dengan arahan dari atasan.
- 4) Melaksanakan pendataan dan memonitor absensi pekerja serta mengajukan saran kepada atasan.
- 5) Melaksanakan administrasi cuti dan memonitor pelaksanaan cuti pekerja.
- 6) Melaksanakan sosialisasi ketentuan perusahaan dan ketentuan ketenaga kerjaan.
- 7) Melakukan pembinaan rohani, olahraga dan kesenian di lingkungan pekerja di Unit Usaha.
- 8) Membuat laporan manajemen bidang sumber daya manusia dan umum.
- 9) Membantu pelaksanaan penyelesaian permasalahan lahan.

13. Krani Puskesbun

Krani Peskesbun mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memberi rekomendasi bagi pekerja yang memerlukan kerja ringan (untuk sementara)
- 2) Memberi cuti sakit.
- 3) Mengawasi penyimpanan, penggunaan dan pembukuan obat.
- 4) Membuat evaluasi kunjungan berobat pasien, *opname* di rumah sakit dan biaya setiap bulan, semesteran dan tahunan.

- 5) Mengadakan penyuluhan kesehatan di lingkungan kerja.
- 6) Evaluasi kebersihan lingkungan rumah dinas.
- 7) Mengadakan penyuluhan kesehatan di lingkungan kerja.

14. Kepala Satpam

Kepala Satpam memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinir pelaksanaan pembagian tugas anggota satpam.
- 2) Melaksanakan pengamanan kebun dan produksi harian.
- 3) Melaksanakan program peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta disiplin anggota satpam.
- 4) Membuat laporan bulanan aktivitas keamanan.
- 5) Membuat evaluasi tugas-tugas anggota yang telah dilaksanakan.
- 6) Menghadiri undangan rapat dengan Polsek/Koramil atau desa sekitar.
- 7) Mengatur pelaksanaan tugas bawahannya agar dapat bekerja secara maksimal.
- 8) Melakukan dan memberikan sanksi teguran lisan kepada bawahan

G. Limbah Operasional Perusahaan

Limbah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit dalam bentuk padat, cair dan gas. Terdapat juga limbah B3 atau limbah berbahaya yang perlu penanganan khusus sebelum membuangnya. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan pabrik pengolahan kelapa sawit (PPKS) PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung ada 3 bentuk :

- d. Limbah Padat

Limbah padat pabrik adalah semua limbah pabrik yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan pabrik. Limbah dari proses pengolahan kelapa sawit pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung yaitu terdiri dari limbah tankos, limbah cangkang, limbah ampas/ fible, aki bekas, drum bekas oil, derigen bekas bahan kimia dan lampu TL bekas.

e. Limbah Cair

Limbah cair adalah semua air buangan yang berasal dari kegiatan pabrik yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah cair dari pabrik pengolahan kelapa sawit seperti ex air proses.

f. Limbah Gas

Limbah gas adalah semua limbah yang berasal dari kegiatan fermentasi limbah cair yang menghasilkan uap. Limbah gas juga biasanya berasal dari limbah B3 berupa majun terkontaminasi minyak, bahan kimia kadaluarsa, filter oil bekas.

H. Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

a. Mengidentifikasi Komponen Biaya Lingkungan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Betung

Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit tidak terlepas dari limbah karena limbah merupakan hasil sisa buangan proses produksi. Adapun PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung dalam

mengidentifikasi limbah yang dihasilkan menjadi 3 bagian, yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugeng Haryanto yang mengungkapkan bahwa :

“Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair, limbah padat dan limbah gas. Limbah cair dan limbah padat hasil dari operasional perusahaan sedangkan limbah gas berasal dari kegiatan fermentasi limbah cair yang menghasilkan uap.”

Pengelolaan yang terjadi atas biaya lingkungan, terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan bahwa biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan dikelompokkan ke dalam sub-sub biaya yang sejenis dalam laporan keuangan umum PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung.

**Tabel 3.1 Biaya Umum PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)
PPKS Unit Usaha Betung Tahun 2016**

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Betung		Biaya Umum	
No Rekening	Nama Rekening	Jumlah Biaya (Rp)	
		Real	RKAP
400	Gaji, tunjangan, sansos Gol III/IV	333.246.405	366.277.952
401	Gaji, tunjangan, sansos Gol I/II	1.635.147.931	1.279.825.282
402	Biaya Honorer dan Sansos	32.388.000	32.388.000
406	Pengangkutan, perjalanan, dan penginapan	354.336.332	364.525.090
408	Biaya hyperkes/kb	25.855.635	31.252.000

409	Biaya pekerja lainnya	547.009.341	653.112.520
410	Pemeliharaan rumah	6.151.010	88.641.575
411	Pemeliharaan bangunan perusahaan	248.532.539	462.627.890
413	Pemeliharaan jalan, jembatan, dan saluran air	16.727.272	50.747.000
414	Pemeliharaan alat pertanian/ inv kecil	127.561.793	141.765.000
420	Iuran dan sumbangan	-	
421	Pajak dan sewa tanah	706.343.315	707.186.330
422	Asuransi	291.602.076	550.113.284
423	Biaya keamanan	2.177.016.971	2.178.710.720
424	Biaya penerangan	110.300.576	174.179.728
425	Biaya air	235.537.703	290.121.168
426	Biaya lain-lain	205.822.364	221.465.000
442	Biaya limbah	3.593.032.216	5.105.309.944
	Total Seluruh	10.649.611.479	12.698.238.483

Sumber: PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Betung

**Tabel 3.2 Biaya Umum PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)
PPKS Unit Usaha Betung Tahun 2017**

PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Betung		Biaya Umum	
No Rekening	Nama Rekening	Jumlah Biaya (Rp)	
		Real	RKAP
400	Gaji, tunjangan, sansos Gol III/IV	416.775.959	445.807.615
401	Gaji, tunjangan, sansos Gol I/II	1.393.305.020	1.626.473.747
402	Biaya Honorer dan Sansos	24.000.000	24.000.000
406	Pengangkutan, perjalanan, dan penginapan	169.679.133	533.821.159
408	Biaya hyperkes/kb	12.897.500	72.160.000
409	Biaya pekerja lainnya	377.432.841	449.769.744
410	Pemeliharaan rumah	4.871.667	40.244.764
411	Pemeliharaan bangunan	380.022.803	577.057.614

	perusahaan		
413	Pemeliharaan jalan, jembatan, dan saluran air	-	78.250.000
414	Pemeliharaan alat pertanian/ inv kecil	236.975.673	324.852.400
420	Iuran dan sumbangan	-	-
421	Pajak dan sewa tanah	828.665.906	619.668.920
422	Asuransi	61.471.300	537.525.000
423	Biaya keamanan	2.290.632.677	2.688.345.243
424	Biaya penerangan	82.640.077	189.160.968
425	Biaya air	262.147.041	332.927.774
426	Biaya lain-lain	120.935.211	324.563.000
442	Biaya limbah	1.786.613.383	5.536.626.250
	Total Seluruh	8.449.066.191	14.401.254.199

Sumber: PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Betung

Tabel 3.3 Rincian Biaya limbahPT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung.

Nomor Rekening	Nama Rekening
442.00.000.00	Biaya PetugasLimbah
442.00.000.02	Biaya Sosial
442.00.000.03	Lembur
442.00.002.00	Analisa Udara dan Emisi
442.00.002.01	Biaya Kunjungan
442.00.002.02	Biaya Analisa Limbah / Tanah
442.00.002.03	Biaya Koordinasi
442.00.002.04	Izin Land Aplikasi
442.00.003.00	Biaya Tankos
442.00.003.01	Biaya Limbah Cair (POC)
442.00.004.02	Pengurusan Kolam Abu Boiler
442.00.004.03	Pengurusan Parit Air Hujan
442.00.009.00	Lain-lain Limbah

Sumber: PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Betung

b. Pengakuan Biaya Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)

PPKS Unit Usaha Betung

Pengakuan berhubungan dengan masalah transaksi akan dicatat atau tidak dalam sistem pencatatan, sehingga pada akhirnya transaksi tersebut akan berpengaruh pada laporan keuangan perusahaan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait . dalam mengakui setiap biaya-biaya yang terkait kegiatan operasional PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung mengakui elemen tersebut sebagai biaya apabila sudah memberikan manfaat bagi pihak perusahaan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sugeng Haryanto selaku Kepala Bagian Akuntansi Keuangan bahwa:

“Alokasi biaya pengelolaan limbah di ambil dari anggaran biaya tahunan dan baru bisa di sebut biaya apabila sudah digunakan dan memberikan manfaat pada periode ini, meskipun kas belum dikeluarkan, Seperti pembayaran gaji, pemeliharaan, ataupun biaya listrik.”

Biaya lingkungan pabrik pengolahan kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung dapat ditelusuri melalui akun biaya produksi dan biaya umum. Biaya produksi ini memuat biaya lingkungan yang terkait dengan perbaikan peralatan dan pabrikasi pada sub biaya pengolahan dan biaya umum memuat biaya lingkungan yang terkait dengan kegiatan sosial dan pemeriksaan limbah pada sub biaya limbah. Pelaporan biaya lingkungan hidup menjadi satu dalam neraca bulanan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha

Betung. Anggaran biaya lingkungan tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung dan penganggaran biaya ini mengacu pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pabrik PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung telah direncanakan sesuai dengan RKAP yang telah disusun setiap tahun yang kemudian dikirimkan kepada induk perusahaan yaitu PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) di Lampung.

c. Pengukuran biaya lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung dalam mengukur biaya-biaya lingkungan (dalam hal biaya pengelolaan limbah) menggunakan satuan rupiah berdasarkan kos yang dikeluarkan dan diambil dari realisasi anggaran periode sebelumnya, sering kali disebut dengan *Historical Cost*. Hal ini didasarkan atas pernyataan dari Bapak Sugeng Haryanto yang menyatakan bahwa :

“Dalam mengukur biaya limbah, perusahaan menggunakan rupiah, sesuai yang sudah dikeluarkan dan mengacu pada hasil rata-rata realisasi anggaran periode sebelumnya, karena itu lebih akurat, sehingga tidak akan

jauh berbeda dengan realisasi periode saat ini.”

Dari pernyataan Bapak Sugeng Haryanto selaku bagian penyusunan anggaran tersebut bahwa untuk pencatatan biaya-biaya terkait

limbah sudah memiliki no rekening sendiri, serta untuk pengeluaran biaya itu sendiri menyesuaikan satuan moneter yang telah dikeluarkan dan melihat realisasi anggaran tahun lalu.

d. Penyajian Biaya Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

Penyajian berkaitan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan. Biaya yang timbul dalam hal pengelolaan lingkungan (pengelolaan limbah) pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung ini disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya lain yang sejenis ke dalam sub biaya umum. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Haryanto sebagai berikut : “Biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah, oleh perusahaan dijadikan satu dalam laporan keuangan umum yang dibuat perusahaan berupa biaya gaji, biaya pemeliharaan, biaya listrik dan biaya yang dikeluarkan untuk limbah cair, limbah padat dan limbah yang diproses kembali. Dan Menjadi sebuah keharusan untuk perusahaan menyajikan di laporan keuangan utama perusahaan karena semua biaya pengolahan limbah merupakan bagian dari kewajiban perusahaan sehingga disajikan bersama dalam Laporan Keuangan.”

Berdasarkan keterangan tersebut dan setelah dilakukan penelusuran secara langsung bahwa biaya lingkungan (biaya pengelolaan limbah) yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung disajikan pada laporan keuangan umum perusahaan dimasukkan ke

biaya umum dan biaya produksi yang tersaji dalam Laporan Laba Rugi Perusahaan.

Dari hasil wawancara sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasanya biaya-biaya lingkungan disajikan dalam laporan keuangan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung dengan dikelompokkan pada akun yang sejenis. Salah satu laporan keuangan tersebut adalah laporan operasional yang didalamnya terdapat akun-akun biaya yang berkaitan dengan hasil kegiatan operasional PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung. Setelah melakukan penelusuran dengan melihat data sekunder yaitu laporan operasional PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung telah diketahui bahwa biaya-biaya terkait dengan kualitas lingkungan dikelompokkan dalam biaya operasional yaitu biaya produksi pada akun biaya pengolahan dan biaya umum pada akun biaya pemeliharaan dan biaya limbah.

e. Pengungkapan Biaya Lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

Pengungkapan berkaitan dengan masalah bahwa suatu informasi keuangan atau kebijakan akuntansi perusahaan tersebut diungkapkan atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan selama penelitian berlangsung, perusahaan mengungkapkan kebijakan akuntansi, kegiatan kewajiban bersyarat sehubungan dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup (PLH) dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

Perusahaan. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Haryanto sebagai berikut : “Perusahaan mengungkapkan kebijakan akuntansi, kegiatan kewajiban bersyarat sehubungan dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup (PLH) dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Perusahaan.”

Dari pernyataan hasil wawancara tersebut bahwasanya PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung belum mengungkapkan kebijakan khusus mengenai biaya-biaya terkait kualitas lingkungan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi Biaya Lingkungan

Setelah melakukan penelusuran berdasarkan bukti-bukti mengenai pengolahan limbah yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung, maka diketahui adanya biaya-biaya lingkungan terkait pengolahan limbah yang dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung telah mengeluarkan biaya-biaya terkait dengan kegiatan lingkungannya namun, belum diidentifikasi secara khusus oleh pihak PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung dikarenakan biaya-biaya terkait dengan limbah masih dilaporkan bersamaan dengan biaya operasional lain di laporan keuangan.

Untuk memisahkan antara biaya lingkungan dengan biaya operasional lainnya dalam Hansen & Mowen diklasifikasi biaya lingkungan menjadi empat kategori yaitu biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal, dan biaya kegagalan eksternal. Unsur-unsur biaya yang terkait dengan biaya lingkungan pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung jika diklasifikasikan dalam empat kategori tersebut antara lain :

1. Biaya pencegahan

Biaya pencegahan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha

Betung yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Gaji petugas limbah
- Biaya sosial petugas limbah
- Biaya kunjungan
- Biaya koordinasi

2. Biaya deteksi

Biaya deteksi pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha

Betung antara lain:

- Biaya analisa limbah/ tanah dan
- Biaya analisa udara dan Emisi

3. Biaya kegagalan internal

Biaya kegagalan internal pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS

Unit Usaha Betung yaitu :

- Biaya Izin Land Aplikasi
- Biaya izin penyimpanan limbah B3
- Biaya tankos
- Biaya limbah cair (POC)
- Pengurusan kolam Abu Boiler

4. Biaya kegagalan Eksternal

Biaya kegagalan eksternal merupakan biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan.

Contohnya biaya pembersihan danau yang tercemar namun, untuk biaya kegagalan eksternal pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung tidak ada karena belum terjadi.

Tabel 1.4
Perbandingan Alokasi Biaya

No	Teori Hansen dan Mowen	PTPN 7 (Persero)PPKS Unit Usaha Betung
1	Biaya Pencegahan Lingkungan - Evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi - Pelaksanaan penelitian lingkungan - Mendesain produk - Mengevaluasikan dan memilih pemasok - Mendaur ulang produk - Mengaudit resiko lingkungan - Melaksanakan studi lingkungan - Mengembangkan system manajemen lingkungan	- Gaji petugas limbah - Biaya sosial petugas limbah - Biaya kunjungan - Biaya koordinasi
2	Biaya Deteksi Lingkungan - Pelaksanaan pengujian pencemaran - Pemeriksaan produk dan proses (agar ramah lingkungan). - Audit aktivitas lingkungan - Memverifikasikan kinerja - Mengukur tingkat pencemaran - Mengembangkan ukuran kinerja lingkungan	- Biaya analisa limbah/ tanah - Biaya analisa udara dan Emisi
3	Biaya Kegagalan Internal - Pengolahan dan pembuangan limbah beracun - Daur ulang sisa bahan - Mengoperasikan peralatan untuk mengurangi atau menghilangkan polusi - Pemeliharaan peralatan polusi - Mendapatkan lisensi fasilitas untuk memproduksi limbah	- Biaya Izin Land Aplikasi - Biaya izin penyimpanan limbah B3 - Biaya tankos - Biaya limbah cair (POC) - Pengurusan kolam Abu Boiler
4	Biaya Kegagalan Eksternal - Membersihkan danau yang tercemar	- Biaya kegagalan eksternal

- Membersihkan minyak yang tumpah - Membersihkan tanah yang tercemar - Hilangnya penjualan karena reputasi lingkungan yang buruk - Menerima perawatan medis karena polusi udara	pada pabrik pengolahan kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung tidak ada karena belum terjadi
--	---

Sumber : Diolah Peneliti

Dari tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwasanya PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung belum mengklasifikasikan biaya lingkungan. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung telah mengeluarkan biaya-biaya lingkungan yang terkait untuk pengklasifikasiannya masih dikelompokkan dengan biaya-biaya umum lain yang sejenis.

Dimana dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 6 Ayat 2 : Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 menyatakan: Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Didukung pada pasal 66 ayat 2 dan 3 menyatakan: (2) laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya : laporan keuangan, laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan dll. (3) laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Maka perusahaan menetapkan pengungkapan biaya lingkungan sesuai kebijakan perusahaan hal ini sesuai dengan PSAK No 1. Paragraf 09, mengenai informasi tambahan dinyatakan bahwa : “ perusahaan dapat pula mengungkapkan dan menyajikan laporan tambahan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan ini memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung telah mengungkapkan laporan keuangan biaya pengelolaan limbah pada laporan keuangan akan tentang PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung kurang informatif dalam mengungkapkan biaya lingkungan tersebut karena biaya lingkungan (biaya pengelolaan limbah) di masukkan serumpun dengan biaya lainnya pada rekening biaya umum.

B. Pengakuan

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, biaya untuk pengolahan limbah pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung dialokasikan secara periodik satu bulan berjalan yang diakui dalam bentuk laporan keuangan dalam neraca percobaan. Hal ini dapat dilihat dari rekening biaya umum pada laporan neraca percobaan. Dimana alokasi biaya lingkungan pada perusahaan diambil dari anggaran biaya tahunan yang sudah dianggarkan yang dialokasikan secara periodik bulan berjalan.

Meskipun pada awal periode akuntansi kepala urusan umum dan produksi menerima dana anggaran untuk periode satu tahun, akan tetapi pada dasarnya

adalah bahwa kas tersebut masih berbentuk alokasi anggaran (rencana biaya) yang masih belum dapat disebut sebagai biaya, karena pembiayaan untuk lingkungan (dalam hal pengolahan limbah) tersebut dilakukan setiap bulan dan pada akhir periode akuntansi akan dijumlahkan untuk dilaporkan pada laporan neraca percobaan dan baru diakui sebagai biaya pada akhir periode.

Berikut ini adalah perbandingan pengakuan menurut PSAK dan menurut PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung :

Tabel 4.2 Perbandingan Pengakuan Biaya Lingkungan

Keterangan	PSAK	PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung
Pengakuan biaya lingkungan	Belum adanya peraturan tentang pengakuan biaya-biaya lingkungan. Yang diatur dalam PSAK tentang kewajiban dan aktiva	Pengalokasian pembiayaan untuk pengelolaan limbah dilakukan secara periodik setiap bulan dan pada akhir periode akuntansi akan dijumlahkan untuk dilaporkan pada laporan neraca percobaan dan baru diakui sebagai biaya pada akhir periode. Atau disebut dengan accrual basis

Sumber : Data Diolah

Karena tidak adanya pengakuan dan pengukuran biaya-biaya lingkungan yang terjadi menurut PSAK, maka perusahaan menetapkan pengakuan biaya lingkungan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan sesuai dengan PSAK No. 1 dijelaskan bahwa :

“ apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapai melalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi yang sesuai dengan paragraf 14 serta menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa

sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami”.

C. Pengukuran

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung dalam mengukur nilai dan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan lingkungan ini menggunakan acuan realisasi anggaran periode sebelumnya. Perusahaan mengasumsikan bahwa realisasi anggaran periode yang lalu merupakan acuan yang valid dalam menentukan nilai dan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan lingkungan dalam satu periode karena akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai dengan kebutuhan riil setiap periode. Berikut akan disajikan tabel dalam mengukur dan menilai biaya lingkungan.

Perusahaan mengalokasikan anggaran biaya untuk lingkungan setiap tahunnya. Berikut ini adalah perbandingan pengukuran menurut PSAK dan menurut PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung :

Tabel 4.3 Perbandingan Pengukuran Biaya Lingkungan

Keterangan	Menurut PSAK	Menurut PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung
Pengukuran biayalingkungan	Belum mengatur tentang pengukuran biaya lingkungan. Yang diatur dalam PSAK pengukuran tentang aktiva, kewajiban diukur sebesar <i>Historical cost</i>	PTPN VII (Persero) Unit Betung dalam mengukur biaya pengolahanlimbah menggunakan acuan satuan rupiah. Menggunakan biaya yang dikeluarkan dan diambil dari realisasi anggaran periode sebelumnya atau disebut juga dengan <i>Historical cost</i> .

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan perbandingan tersebut PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung dalam pengukuran biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengelolaan lingkungan dengan menggunakan satuan moneter yang sudah diterapkan sebelumnya dan sebesar yang dikeluarkan. Sehingga akan diperoleh jumlah dan nilai yang tepat sesuai kebutuhan riil perusahaan setiap periode.

D. Penyajian

Biaya yang timbul dalam hal pengelolaan lingkungan (pengelolaan limbah) pada PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung disajikan bersama-sama dengan biaya lain yang sejenis kedalam sub biaya lain yang sejenis ke dalam sub biaya umum. Dimana PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung dalam menyajikan biaya lingkungan menganut Model Normatif, yaitu mengakui dan mencatat biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain yang serumpun. Dalam pencatatannya perusahaan menggolongkan biaya lingkungan dalam biaya umum dalam laporan neraca percobaan.

Dimana dalam PSAK No 1(Revisi 2013) Tahun 2015, paragraph empatbelas (14) yang menyatakan: “Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar dari ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan.”

Dari pernyataan tersebut Sebaiknya perusahaan dalam menyajikan laporan biaya lingkungan terpisah dari rekening lain agar perusahaan dapat mengetahui berapa biaya-biaya yang dikeluarkan secara rinci dalam pengelolaan lingkungannya hal ini bermanfaat bagi manajemen dalam memperoleh informasi tentang biaya lingkungan yang telah dikeluarkan perusahaan pada periode akuntansi.

E. Pengungkapan

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait informasi dalam laporan keuangan ke dalam catatan atas laporan keuangan (CALK). Namun berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, bahwa PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung kurang informatif dalam mengungkapkan rincian mengenai biaya lingkungan (biaya pengelolaan limbah) dan juga belum mengungkapkan kebijakan mengenai biaya lingkungan secara khusus dalam catatan laporan keuangan (CALK). dimana biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan limbah dijadikan satu dengan biaya umum sehingga pada pengungkapannya biaya terkait pengolahan limbah menjadi satu dengan biaya yang sejenis. Berikut ini biaya pengelolaan limbah PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung yang tidak diungkapkan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan:

Tabel 4.4
Rincian Biaya Lingkungan (Biaya Pengelolaan Limbah) PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

Nomor Rekening	Nama Rekening	Jumlah Biaya (Rp) Tahun 2016	Jumlah Biaya (Rp) Tahun 2017
442.00.000.00	Gaji Petugas Limbah	217.493.983	195.547.690
442.00.000.02	Biaya Sosial Petugas Limbah	45.016.074	29.175.244
442.00.000.03	Lembur	10.548.000	-
442.00.002.00	Analisa Udara dan Emisi	16.210.000	56.280.800
442.00.002.01	Biaya Kunjungan	2.500.000	1.000.000
442.00.002.02	Biaya Analisa Limbah / Tanah	36.706.145	21.141.300
442.00.002.03	Biaya Koordinasi	3.500.000	
442.00.002.04	Izin Land Aplikasi	5.000.000	
442.00.002.05	Biaya Izin Penyimpanan Limbah B3	-	26.215.000
442.00.003.00	Biaya Tankos	1.717.059.822	1.274.683.852
442.00.003.01	Biaya Limbah Cair (POC)	815.382.956	64.220.866
442.00.004.02	Pengurasan Kolam Abu Boiler	46.259.000	-
442.00.004.03	Pengurasan Parit Air Hujan	46.204.000	-
442.00.009.00	Lain-lain Limbah	631.152.236	118.348.631
	Jumlah	3.593.032.216	1.786.613.383

Sumber : Data PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung

Dalam hal ini PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Betung sudah baik dalam menyusun laporan keuangan mengenai biaya lingkungan hanya saja perusahaan kurang informatif dalam mengungkapkan laporan keuangan

biaya lingkungan dimana biaya lingkungan dimasukkan bersama dengan biaya-biaya lain dalam rekening biaya umum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan mengenai Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Atas Biaya Pengelolaan Limbah Pabrik PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung, antara lain :

1. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung mengakui biaya pengelolaan limbah menggunakan metode *accrual basis*. Dimana Pengalokasian pembiayaan untuk pengelolaan limbah dilakukan secara periodik setiap bulan dan pada akhir periode akuntansi akan dijumlahkan untuk dilaporkan pada laporan neraca percobaan dan baru diakui sebagai biaya pada akhir periode.
2. Dalam pengukuran biaya lingkungan (dalam hal pengelolaan limbah) PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung menggunakan satuan rupiah. Menggunakan biaya yang dikeluarkan dan diambil dari realisasi anggaran periode sebelumnya atau disebut juga dengan *Historical cost*.

3. Dalam penyajian biaya lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)PPKS Unit Usaha Betung menyajikan di dalam laporan neraca percobaan dikelompokkan dengan biaya-biaya lain yang sejenis. Dimana PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung dalam menyajikan biaya lingkungan menganut Model Normatif, yaitu mengakui dan mencatat biaya lingkungan secara keseluruhan yakni dalam lingkup satu ruang rekening secara umum bersama rekening lain.
4. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung sudah baik dalam perlakuan akuntansi biaya lingkungan hanya saja biaya lingkungan tersebut masih disajikan bergabung dengan biaya administrasi dan umum selain itu, pengungkapannya dalam catatan atas laporan keuangan belum disajikan secara rinci dan belum mengungkapkan kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan tentang biaya tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna, namun peneliti mencoba memberikan saran untuk perusahaan dan peneliti selanjutnya agar kedepannya jauh lebih baik lagi yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan pihak PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)PPKS Unit Usaha Betung menyusun laporan biaya lingkungan atau laporan terkait pengelolaan limbah secara khusus dari laporan keuangan secara umum untuk memberikan informasi bagi pengendalian kualitas lingkungan

sebagai bentuk usaha peningkatan kualitas lingkungan dan tanggung jawab terhadap lingkungan disekitar perusahaan

2. Diharapkan pihak PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)PPKS Unit Usaha Betung dapat menyusun laporan biaya lingkungan seperti halnya diklasifikasikan dalam teori Hansen dan Mowen yang meliputi biaya pencegahan, biaya deteksi, biaya kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal agar dapat mengetahui dari keempat jenis biaya tersebut manakah yang paling banyak mengeluarkan biaya sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh pabrik.
3. Diharapkan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)PPKS Unit Usaha Betung juga dapat mengungkapkan pengolahan limbah secara terperinci di dalam catatan atas laporan keuangan untuk memberikan informasi secara menyeluruh
4. Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan secara menyeluruh pengungkapan perlakuan akuntansi pada biaya pengelolaan limbah dan dapat menemukan standar pengalokasian biaya lingkungan secara khusus sehingga bisa diperbandingkan dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan hasil yang didapat dari peneliti secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhsan Arfan, *Akuntansi Manajemen Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Hansen Don R dan Maryanne M Mowen, *Akuntansi Manajerial*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Mundiatur dan Daryanto, *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*, Yogyakarta: Gava Media, 2015
- Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*, Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2014
- Ahmed, Riahi, *Teori Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Hadi, Nor, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Harti, Dwi. *Modul Akuntansi*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009
- Ghony Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: AR – Ruzz Media, 2017
- Hansen Mowen, *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2000
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Sudaryono, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015

Sugiyono, 2011. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*, Bandung: :

Alfabeta

Louis E, Boone dan Kurtz, David I, *Pengantar Bisnis Kontemporer*, Jakarta:

Salemba Empat, 2008

PT Perkebunan Nusantara VII. *Http://www.ptpn7.com*. (Diakses tanggal 24 April 2013).

PT Perkebunan Nusantara I-XIV, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, dkk. 2011. *Pedoman Akuntansi BUMN Perkebunan Berbasis IFRS*. Jakarta.

Antonius Wasi Wanggono “*Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan*” Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016

Wida rahayu “*Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pengolahan Limbah Pabrik Gula Lestari Nganjuk PT. Perkebunan Nusantara X*” Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2015

Aminah Noviani “*Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro*” Universitas Bandar Lampung, Vol. 5 No. 2 September 2014

H Andre Purwanugraha “*Analisis Biaya Lingkungan Pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta*” Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013

Fika Erisya Islamey “*Perlakuan Akuntansi Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Pada Rumah Sakit Paru Jember*” Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember, 2016

- Aristha Purwanthari Sawitri “*Analisis Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan*” Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, 2017
- Holly Deviarti “*Evaluasi Pengungkapan Akuntansi Lingkungan Dalam Perspektif PT Timah (Persero) Tbk*” Fakultas Ekonomi Dan Komunikasi Universitas Binus, 2012
- Susiana Sari “*Penerapan Akuntansi Lingkungan Untuk Mengoptimalkan Tanggung Jawab Industri Gula*” Fakultas Ilmu Administrasi Malang, JAB Vol. 2 No. 1 Mei 2013
- Morissan, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhajirin dan Maya Panorama, *Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017
- Sanusi, Anwar, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011
- Siswanto dan Suyanto, *Metodologi Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif*, Klaten: BOSSSCRIPT, 2016
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 *Tentang Penanaman Modal*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*
- PT Perkebunan Nusantara VII. [Http://www.ptpn7.com](http://www.ptpn7.com). (Diakses tanggal 24 Agustus 2018)



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Estri Mei Sari
 NIM : 14190105
 Fakultas/Jurusan : FEB/Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan atas Biaya Pengelolaan Limbah Pabrik PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung
 Pembimbing I : Rika Lidyah, SE., M.Si., AKK, EA

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Di Konsulkan	Paraf
①	29-8-2018	Bab 1 : Pembahasan Latar belakang masalah dan PSMC. 2 : Teori ?	R.
②	6/9 '2018	ACC bab 1-2 Lengkap bab 3	R.
③	18/9 '2018	Pembahasan bab 3 - Lengkap bab 4	R
④	25/9 '2018	ACC bab 3 Lengkap bab 4-5	R.
⑤	18/10 '2018	Bab 4 & pembahasan bab 4 SMK & teori 4) lengkap	R
⑥	22/10 '2018	ACC bab 1 - V Lengkap untuk bab 4	R



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat: Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Estri Mei Sari
 NIM : 14190105
 Fakultas/Jurusan : FEBI/Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan atas Biaya Pengelolaan Limbah Pabrik PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) PPKS Unit Usaha Betung
 Pembimbing II : Emi Yulia Siska, SE., M.Si

No.	Hari/Tanggal	Hal Yang Di Konsulkan	Paraf
	Rabu, 4 Juli 2018	Proposal	
		Perbaiki proposal	
		Acc Proposal	
	Kamis, 5 Juli 2018	Perbaiki Bab I	
	Kamis, 19 Juli 2018	Acc Bab I	
	Jelasa, 24 Juli 2018	Acc Bab II	
	Kamis, 16 Agt 2018	Perbaiki Bab III	
	Senin, 27 Agt 2018	Acc Bab III	
	Kamis, 27 Sep 2018	Perbaiki Bab II, III	
	Senin, 1 Okt 2018	Perbaiki Bab IV, V	
	Senin, 8 Okt 2018	Perbaiki Bab IV, V	
	Selasa, 16 Okt 2018	Perbaiki Bab IV, V	
	Rabu, 17 Okt 2018	Perbaiki Bab V	
	Kamis, 18 Okt 2018	Acc Bab I s.d V	
	Senin, 22 Okt 2018	Acc uraian Munaqasah	



KEMENTERIAN AGAMA
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Alamat: JL. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C

Hal : Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada Yth,
 Ketua Prodi Fakultas Ekonomi
 dan Bisnis Islam
 UIN Raden Fatah Palembang

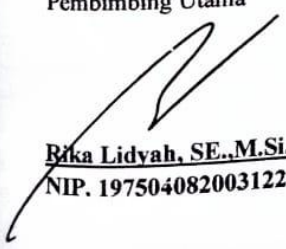
Skripsi Berjudul : Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Atas Biaya Pengelolaan
 Limbah Pabrik PT. Perkebunan Nusantara VII (Perser) PPKS Unit
 Usaha Betung

Ditulis Oleh : Estri Mei Sari

NIM : 14190105

Saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada fakultas Ekonomi
 dan Bisnis Islam untuk diajukan dalam ujian *Komprehensif* dan ujian *Munqasyah* ujian
 skripsi.

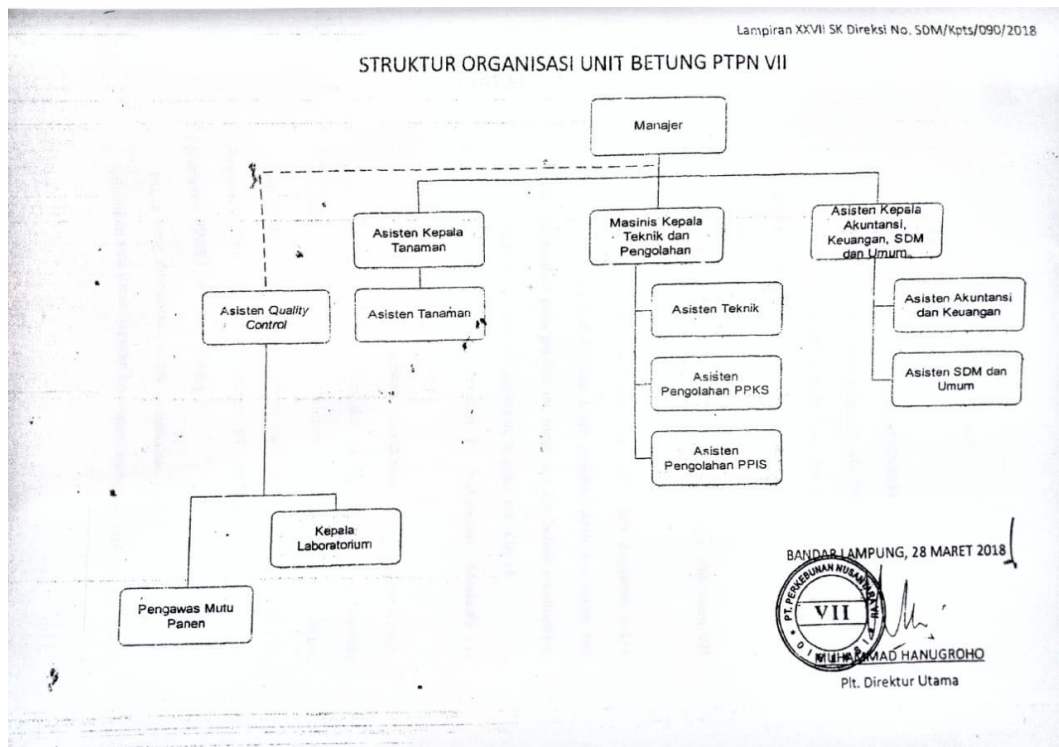
Pembimbing Utama


Rika Lidyah, SE., M.Si., Ak., CA
 NIP. 197504082003122001

Palembang, Oktober 2018

Pembimbing Kedua


Emi Yulia Siska, SE., M.Si
 NIP. 197407012009012005



PTP PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO)		NERACA PERCOBAAN				HALAMAN : 3	
UNIT BETUNG		Desember 2017					
NO REKENING	NAMA REKENING	SALDO AWAL		MUTASI		SALDO AKHIR	
		DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT	DEBIT	KREDIT
043	BANGUNAN RUMAH	0	0	0	0	0	0
044	BANGUNAN PERUSAHAAN	0	0	0	0	0	0
045	MESIN & INSTALASI	4,709,785,000	0	2,343,101,578	7,052,886,578	0	0
046	JALAN, JEMBATAN, SALAIR	0	0	0	0	0	0
047	ALAT ANGKUTAN	0	0	0	0	0	0
048	INVENTARIS KECIL NON TANAMAN	0	0	0	0	0	0
049	INVENTARIS LAINNYA	387,215,006	0	0	387,215,006	0	0
	Jumlah :	5,097,000,006	0	2,343,101,578	7,440,101,584	0	0
051	BANGUNAN PENYELESAIAN	0	0	0	0	0	0
060		0	0	0	0	0	0
071		0	0	0	0	0	0
	Jumlah :	0	0	0	0	0	0
2502	BIBITAN KELAPA SAWIT	0	0	0	0	0	0
	Jumlah :	0	0	0	0	0	0
4	BIAYA UMUM	7,368,932,837	0	1,481,226,516	401,093,162	8,449,066,191	0
490	AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA	15,424,019,026	0	1,861,227,818	0	17,285,245,844	0
500		0	0	0	0	0	0
	Jumlah :	22,792,950,863	0	3,342,454,334	401,093,162	25,734,312,035	0
60821	BIAYA PRODUKSI PEMBELIAN	0	0	0	0	0	0
60900		0	0	0	0	0	0
60920	BIAYA KOEFISIEN INTI SAWIT	0	0	1,637,542,146	1,637,542,146	0	0
60921	BIAYA TRANSFER PRECING TBS	111,095,391,887	0	15,858,265,640	5,279,767,508	121,673,890,013	0
60922	BIAYA TRANSFER INTI SAWIT	30,679,646,735	0	4,317,569,564	1,591,367,856	33,405,848,443	0
62	BIAYA LANGSUNG K.SAWIT	36,868,211,318	0	8,666,305,718	236,475,672	45,298,081,364	0